



KLIPING

BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Media cetak: Bangka Pos Babel Pos
 Babel News Radar Bangka
 Rakyat Pos Lainnya: _____

Tanggal:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
							√								

Bulan:

1	2	3	4	5	6
					√
7	8	9	10	11	12

Thn:

2
0
1
6

Halaman:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
			√																					

NJOP Kawasan Banjir Termahal

■ Kenaikan PBB Bumi Tunggu SK Wali Kota

PANGKALPINANG, BANGKA POS - Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pangkalpinang masih menunggu Surat Keputusan Wali Kota untuk menaikkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi yang rata-rata 300 persen. Rencananya, DPPKAD akan mencetak massal SPT PBB 2016 pada pekan ini. Dan bakal didistribusikan Juli mendatang.

Sementara untuk PBB Bangunan, DPPKAD melakukan penyesuaian mengikuti kenaikan bahan komponen

Termahal 2015

NAMA JALAN	Penggolongan Nilai Jual Bumi*)	Ket NJOP Bumi*)
Jenderal Sudirman	2.261.000 s/d 2.444.000	2.352.000
M Syafrie Rachman	2.261.000 s/d 2.444.000	2.352.000
Gereja	2.261.000 s/d 2.444.000	2.352.000
Jagal	2.261.000 s/d 2.444.000	2.352.000
Pasar Lama	2.261.000 s/d 2.444.000	2.352.000
Pegadaian	2.261.000 s/d 2.444.000	2.352.000
Stasiun	2.261.000 s/d 2.444.000	2.352.000
Trem	2.261.000 s/d 2.444.000	2.352.000
BTC	2.261.000 s/d 2.444.000	2.352.000
RE Martadina	2.261.000 s/d 2.444.000	2.352.000
PS Inpres	2.261.000 s/d 2.444.000	2.352.000
PS Pembangunan	2.261.000 s/d 2.444.000	2.352.000
Melintas	1.934.000 s/d 2.091.000	2.013.000
Hamidah	1.789.000 s/d 1.934.000	1.862.000
Merdeka	1.655.000 s/d 1.789.000	1.722.000

■ ke halaman 7

■ ke halaman 7



KLIPING

BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Media cetak: Bangka Pos Babel Pos
 Babel News Radar Bangka
 Rakyat Pos Lainnya: _____

Tanggal:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
							√								

Bulan:

1	2	3	4	5	6
					√
7	8	9	10	11	12

Thn:

2
0
1
6

Halaman:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
			√																					

Termahal 2015

Sambungan Halaman 1

Soekarno Hatta	1.207.000 s/d 1.341.000	1.274.000
Depati Hamzah	1.207.000 s/d 1.341.000	1.274.000
Diponegoro	1.086.000 s/d 1.207.000	1.147.000
Harmoni	1.086.000 s/d 1.207.000	1.147.000

SUMBER: DPPKAD PANGKALPINANG (TIM)

Sejahterakan Dulu

Sambungan Halaman 1

Untuk pangkalpinang ini basis industri harus dikembangkan, pemerintah harus berhati-hati kalau tidak jeli. Pemerintah harus ada terobosan, Pangkalpinang lahannya lebih kecil dari kabupaten yang lain jadi harus ada industri pengolahan hasil pertanian kalau ingin maju. (tim)

Sektor Retail

Sambungan Halaman 1

pajak ini dinilai masih asing serta pengklasifikasian pajak indoor yang dinilai belum spesifik.

"Kita keagat waktu disidak terus dicatat padahal sebenarnya kita belum tahu sebenarnya bentuk yang kena pajak seperti apa. Biasanya kita diundang sosialisasi untuk pajak perda dan perwako" kata Gledi, Jumat (20/5).

Dia menjelaskan beberapa display gambar yang melengkapi rak buku turut berpotensi dikenakan pajak. "Inilah gak ada pengklasifikasian dan beda persepsi. Bagi kita ini bukan hiasan yang dapat menarik calon konsumen tapi bisa ke na pajak," keluhnya.

Beberapa merek pun mulai mencabut nama merek di dalam toko yang sebenarnya

berfungsi sebagai petunjuk. Langkah pemungutan pajak reklame indoor ini segera diinfokan Gledi kepada suplier yang bekerjasama dengan Gramedia. Hingga kini empat merek barang diantaranya Rey, Planet Ocean dan Angela Toys.

"Kita bicarakan kepada suplier dan kata mereka ya udah copot aja. Penjualan pun jadi gak menarik," tambahnya.

Selama satu tahun sebagai Store Manager Toko Buku Gramedia setidaknya ini menjadi pengalaman baru. Pernah bertugas di kota lain seperti Surabaya dan Jember. Perda soal pungutan pajak tiap daerah memang dirasa berbeda. Alat petunjuk atau display produk yang diartikan reklame inbox oleh DPPKAD

"Di dalam rumah (dalam toko) kita bukan promosi tapi petunjuk untuk menarik pengunjung. Di Jember reklame

pai 8 juta," ujarnya.

Belum pasti

Lebih lanjut Fitri mengatakan hingga saat ini belum ada surat keputusan wali kota untuk kenaikan NJOP yang direncanakan. Sehingga belum bisa dipastikan apakah itu akan terealisasi atau tidak. Pihaknya berencana untuk mencetak pasal SPT PBB dalam minggu ini dan akan disebar pada bulan Juli mendatang, namun masih menunggu keputusan wali kota.

"Cetak insha Allah minggu ini, distribusikan bulan depan, kami sedang merapikan data, pemutakhiran data, revisi perda NJOPTKP,

tahun kemarin kan juga sudah naik saya tahun 2015 bayar PBB itu dua juta lebih, tahun 2014 itu dak sampai sejuta, kalau naik lagi jadi berapa PBB yang harus dibayar," keluhnya.

Ia berharap pemerintah m e m p e r t i m b a n g k a n kembali rencana tersebut, pasalnya kondisi dagangannya yang sepi dirasa semakin memberatkan dirinya jika harus dibebankan dengan PBB yang semakin besar.

"Kalau naik pasti makin besarkan, kita berat juga mana dagangan sepi, minta dipertimbangkan lagi lah," harapnya. (tim)

yang dipungut biaya itu yang menghadap jalan karena mengundang orang untuk khlayak ramai," jelasnya.

Gledi menjelaskan selama ini perusahaan taat pajak dengan membayar reklame outdoor sesuai ketentuan seperti neon box, piang bertuliskan toko gramedia yang berada di pinggir jalan raya dan tulisan "GRAMEDIA" di pintu masuk. Penetapan jenis pajak reklame diharapkan dibayar berdasarkan aturan yang jelas, pasalnya daya beli masyarakat Pangkalpinang kini sedang turun.

"Kalau yang dulu beli produk karena senang, hobi atau gaya hidup. Sekarang masyarakat membeli hanya yang dibutuhkan terpaksa aja karena disuruh sekolah atau gurunya seperti beli buku sekolah, alat tulis, kamus," jelasnya.

Sunanto, Kasi pendataan

dan penetapan pajak DPPKAD membenarkan tentang penetapan pajak reklame indoor yang bernilai 50 persen dari pajak reklame outdoor

"Semisalnya begini kalau reklame outdoor nilainya Rp.1 juta maka reklme indoor nilainya Rp 500 ribu. Reklame indoor 50% dari reklame outdoor. Nilainya disesuaikan jenis iklan seperti selebaran atau yang lainnya," kata Sunanto.

Ia pun membenarkan bahwa belum ada sosialisasi, namun DPPKAD sendiri menganggap bahwa mendatangi pengusaha untuk menjelaskan secara langsung dianggap sebagai sosialisasi.

"Kita gak punya banyak dana buat sosialisasi mengundang banyak pengusaha di gedung yang besar. SDM kita juga terbatas hanya 30 orang. Jadi kita langsung turun lapangan," ujarnya. (tim)